

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi atau landasan bagi peneliti dalam memperkuat fenomena yang ingin diteliti. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, Domestika Pembagian Kerja Berbasis Gender Pada Bidang Ketenagakerjaan di Kota Surakarta: Penyebab dan Upaya Penyelesaian. Penelitian ini ingin mengetahui faktor penyebab dan upaya yang dilakukan dalam menekan tingkat kesenjangan dalam bidang tenaga kerja yaitu domestikasi pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa domestika pembagian kerja berbasis gender pada bidang ketenagakerjaan yang terjadi di kota Surakarta disebabkan oleh dua faktor: (1) faktor internal yang meliputi *human capital*, serta minat dan *mindset* perempuan. Perempuan diidentikkan sebagai makhluk yang lemah sehingga ditempatkan pada pekerjaan yang ringan. (2) faktor eksternal meliputi faktor demografi, sosial budaya, interpretasi agama yang rancu, peraturan perusahaan dan kebijakan pemerintah. Faktor ini mengacu pada perubahan jumlah partisipasi angkatan kerja, patriarki, peraturan perusahaan yang tidak berwawasan gender dan kebijakan pemerintah yang tidak *responsive gender*. Upaya yang dilakukan ialah dengan meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dengan memberikan pelatihan khusus. Relevansi yang terdapat

dalam penelitian ini ialah kesamaan dalam meneliti sistem pembagian kerja yang terdapat di sebuah instansi, hanya saja penelitian ini terjadinya ketidaksetaraan gender pada karyawan perempuan dan penelitian ini berada di PT Iskandar Indah, Perusahaan Roti dan Solo Grand Mall (Arum, 2012).

Kedua, Mekanisme Pembagian Kerja Berbasis Gender. Hasil Penelitian ini ialah mekanisme pembagian kerja pada petani garam terbentuk berdasarkan konstruksi sosial. Dalam pembagian kerja terjadi pembagian peran antara laki-laki dan perempuan mulai dari pra produksi hingga proses distribusi. Mekanisme pembagian kerja yang terdapat pada penelitian ini bisa dilihat berdasarkan waktu dan berdasarkan beban kerja pembagian kerja ini berdampak pada upah yang mereka terima, dimana upah tersebut disesuaikan dengan posisi mereka dalam bekerja. Pembagian kerja seharusnya tidak perlu melibatkan perempuan didalamnya karena disamping karena faktor pekerjaan yang relatif berat, perempuan lebih ideal bekerja pada bidang-bidang yang sesuai karakternya. Relevansi yang terdapat dalam penelitian ini ialah kesamaan pada pembagian kerja berdasarkan kemampuan individunya, jadi tidak menganggap bahwa perbedaan itu sebuah ketidakadilan melainkan saling melengkapi, hanya saja hal tersebut terjadi di pembagian kerja pada petani garam di Desa Banbaru Giliraja Sumenep (Amir & Suhartini, 2013).

Ketiga, Kesetaraan Gender dalam Pembagian Kerja Pegawai di Taman Kanak-Kanak. Dalam penelitian ini ingin mengetahui kesetaraan, deskriminasi dalam sistem pembagian kerja antara pegawai laki-laki dan perempuan, juga mengetahui bias gender yang terjadi. Hasil penelitian ini menyampaikan bahwa pada aktivitas produksi, reproduksi, maupun sosial kemasyarakatan terdapat

partisipasi dari pegawai laki-laki maupun perempuan. Namun, pada aktivitas produksi sebagian besar dilakukan oleh pegawai perempuan, sedangkan untuk aktivitas reproduksi dan sosial kemasyarakatan terdapat porsi yang sama antara perempuan dan laki-laki, kemudian pada profil akses dan kontrol menunjukkan bahwa pegawai laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang sama dalam mengakses dan mengontrol sumber daya yang dimiliki. Meskipun begitu perempuan memegang peran aktivitas produksi, hal ini menjadikan perempuan sepenuhnya menguasai sumber daya yang dimiliki. Relevansi dalam penelitian ini ialah kesamaan dalam melihat pembagian kerja berbasis gender pada suatu instansi, hanya saja pada penelitian ini terjadi pembagian kerja secara tidak adil dan pegawai yang termarginalisasi ialah pegawai laki-laki yang berada di sebuah Taman kanak-kanak (Putriyani, 2011).

Keempat, Ketidakadilan Gender pada Perempuan dalam Industri Pariwisata Taman Nasional Komodo. Penelitian ini ingin menganalisis bagaimana ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam pekerjaan pariwisata Taman Nasional Komodo. Ketidakadilan gender di sini ialah terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses berbagai jenis pekerjaan. Ketimpangan ini terjadi karena persepsi masyarakat yang memposisikan perempuan pada pekerjaan yang berhubungan dengan rumah seperti pekerjaan dapur. Perempuan juga dianggap lemah karena tidak mampu melakukan pekerjaan berat. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki akses yang luas dalam mendapatkan pekerjaan dan memperoleh suatu jabatan struktural, meskipun mengalami ketidakadilan, namun perempuan-perempuan di Pulau Komodo tidak menyadari hal tersebut justru mereka

beranggapan bahwa tugasnya memang pekerjaan yang berhubungan dengan perempuan. Relevansi dalam penelitian ini ialah kesamaan kasus pembagian kerja di industri pariwisata, hanya saja dalam penelitian ini terjadi ketidakadilan dalam pembagian kerja kemudian pihak perempuan (Ahmad & Yunita, 2019).

Kelima, Disparitas Gender dalam Pembangunan Pariwisata Ramah Lingkungan (*gender disparities in ecologically friendly-tourism development*). Dalam penelitian ini Ismi Dwi Astute Nurhaeni menganalisis disparitas gender dalam pembangunan pariwisata ramah lingkungan, mencakup keterlibatan, kompetensi, hambatan internal dan eksternal perempuan dan laki-laki. Hasil penelitian ini menemukan adanya disparitas gender dalam pembangunan pariwisata ramah lingkungan, dimana perempuan cenderung masih termarjinalkan, baik dalam hal keterlibatan, kompetensi, hambatan internal maupun hambatan eksternal. Disparitas gender tertinggi dalam keterlibatan perempuan dan laki-laki pada pembangunan pariwisata ini terjadi pada tahap implementasi. Kompetensi perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Relevansi yang terdapat dalam penelitian ini yaitu kesamaan dalam melihat perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal keterlibatan pembangunan pariwisata, hanya saja alasan tidak melibatkan perempuan karena di tempat penelitiannya terjadinya bias gender.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Penulis & judul	Hasil penelitian	Relevansi
1	Domestika Pembagian Kerja Berbasis Gender Pada Bidang Ketenagakerjaan di Kota Surakarta: Penyebab Dan Upaya Penyelesaian. (Arum, 2012).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa domestika pembagian kerja berbasis gender pada bidang ketenagakerjaan yang terjadi di kota Surakarta disebabkan oleh dua faktor: (1) faktor internal yang meliputi <i>human capital</i> , serta minat dan <i>mindset</i> perempuan. (2) faktor eksternal meliputi faktor demografi, sosial budaya, interpretasi agama yang rancu, peraturan perusahaan dan kebijakan pemerintah. Upaya yang dilakukan ialah dengan meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dengan memberikan pelatihan khusus.	Relevansi yang terdapat dalam penelitian ini ialah kesamaan dalam meneliti sistem pembagian kerja yang terdapat di sebuah instansi, hanya saja penelitian ini terjadinya ketidaksetaraan gender pada karyawan perempuan dan penelitian ini berada di PT Iskandar Indah, Perusahaan Roti dan Solo Grand Mall
2	Mekanisme Pembagian Kerja Berbasis Gender. (Amir & Suhartini, 2013).	Hasil Penelitian ini ialah mekanisme pembagian kerja pada petani garam terbentuk berdasarkan konstruksi sosial. Dalam pembagian kerja terjadi pembagian peran antara laki-laki dan perempuan mulai dari pra produksi hingga proses distribusi. Mekanisme pembagian kerja yang terdapat pada penelitian ini bisa dilihat berdasarkan waktu dan berdasarkan beban kerja pembagian kerja ini berdampak pada upah yang mereka terima, Pembagian	Relevansi yang terdapat dalam penelitian ini ialah kesamaan pada pembagian kerja berdasarkan kemampuan individunya, jadi tidak menganggap bahwa perbedaan itu sebuah ketidakadilan melainkan saling melengkapi, hanya saja hal tersebut terjadi di pembagian kerja pada petani garam di Desa Banbaru Giliraja Sumenep.

		kerja seharusnya tidak perlu melibatkan perempuan didalamnya karena di samping karena faktor pekerjaan yang relatif berat, perempuan lebih ideal bekerja pada bidang-bidang yang sesuai karakternya.	
3	Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pegawai Di Taman Kanak-Kanak. (Putriyani, 2011).	Hasil penelitian ini menyampaikan bahwa pada aktivitas produksi sebagian besar dilakukan oleh pegawai perempuan, sedangkan untuk aktivitas reproduksi dan sosial kemasyarakatan terdapat porsi yang sama antara perempuan dan laki-laki, kemudian pada profil akses dan kontrol menunjukkan bahwa pegawai laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang sama dalam mengakses dan mengontrol sumber daya yang dimiliki hal ini menjadikan perempuan sepenuhnya menguasai sumber daya yang dimiliki.	Relevansi dalam penelitian ini ialah kesamaan dalam melihat pembagian kerja berbasis gender pada suatu instansi, hanya saja pada penelitian ini terjadi pembagian kerja secara tidak adil dan pegawai yang termarginalisasi ialah pegawai laki-laki yang berada di sebuah Taman kanak-kanak
4	Ketidakadilan Gender Pada Perempuan Dalam Industri Pariwisata Taman Nasional Komodo (Ahmad & Yunita, 2019)	Penelitian ini ingin menganalisis ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam pekerjaan pariwisata Taman Nasional Komodo. Ketidakadilan gender di sini ialah terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses berbagai jenis pekerjaan. Ketimpangan ini terjadi karena persepsi masyarakat yang memposisikan perempuan pada pekerjaan	Relevansi dalam penelitian ini ialah kesamaan kasus pembagian kerja di industri pariwisata, hanya saja dalam penelitian ini terjadi ketidakadilan dalam pembagian kerja kemudian pihak perempuan

		<p>yang berhubungan dengan rumah seperti pekerjaan dapur. Perempuan juga dianggap lemah karena tidak mampu melakukan pekerjaan berat. hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki akses yang luas dalam mendapatkan pekerjaan dan memperoleh suatu jabatan struktural, meskipun mengalami ketidakadilan, namun perempuan-perempuan di Pulau Komodo tidak menyadari hal tersebut justru mereka beranggapan bahwa tugasnya memang pekerjaan yang berhubungan dengan perempuan</p>	
5	<p>Disparitas Gender Dalam Pembangunan Pariwisata Ramah Lingkungan (<i>gender disparities in ecologically friendly-tourism development</i>) (Nurhaeni Dkk, 2017)</p>	<p>Hasil penelitian ini menemukan adanya disparitas gender dalam pembangunan pariwisata ramah lingkungan, dimana perempuan cenderung masih termarginalkan, baik dalam hal keterlibatan, kompetensi, hambatan internal maupun hambatan eksternal. Disparitas gender tertinggi dalam keterlibatan perempuan dan laki-laki pada pembangunan pariwisata ini terjadi pada tahap implementasi. Kompetensi perempuan lebih rendah dibanding laki-laki</p>	<p>Relevansi yang terdapat dalam penelitian ini yaitu kesamaan dalam melihat perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal keterlibatan pembangunan pariwisata, hanya saja alasan tidak melibatkan perempuan karena di tempat penelitiannya terjadinya bias gender.</p>

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Pembagian Kerja

Pembagian kerja menurut Hasibuan (dalam Roring, 2017: 146) pembagian kerja yaitu informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi atau perusahaan.

Manfaat pembagian kerja yaitu agar suatu pekerjaan dapat terselenggara dengan baik sesuai rencana dan dapat diketahui dengan jelas tujuan organisasi dan pegawai yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pekerjaan tersebut. Menurut A.S Moenir (dalam Roring, 2017: 146) manfaat pembagian kerja adalah:

- 1) Memudahkan seseorang melakukan pekerjaannya atau tugasnya tanpa menunggu perintah atau komando
- 2) Diketahui dengan jelas batas wewenang dan tanggung jawab dari pekerjaan itu
- 3) Tidak meragukan dalam pemberian tugas atau pelaksanaan tugas
- 4) Memudahkan pengawasan
- 5) Tidak terjadinya simpang siur atau benturan dalam pelaksanaan pekerjaan
- 6) Menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan kebutuhan pendidikan

Untuk mengukur indikator pembagian kerja, berikut adalah hal-hal yang penting:

- 1) Kemampuan karyawan menyelesaikan tugas

- 2) Kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan karyawan
- 3) Volume pekerjaan
- 4) Kesesuaian pekerjaan dengan latar belakang pendidikan
- 5) Tingkat kenyamanan karyawan dengan pekerjaan

Di dalam perkembangan saat ini, pembagian kerja tidak hanya berhenti pada pembagian jenis kerja, melainkan juga pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Ensiklopedia ilmu sosial memberikan gambaran mengenai pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin (*devision of labour by sex*) sebagai berikut:

Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin merupakan salah satu elemen struktural dasar dalam organisasi sosial. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah asal mula pola pembagian kerja manusia serta konsekuensinya terhadap hubungan antar jenis kelamin. Pandangan umum yang diyakini adalah pola pembagian tersebut diawali oleh fakta bahwa perekonomian subsistem primitive bertumpu pada laki-laki sebagai pencari makan, baik itu dari perburuan, perikanan/pemeliharaan ternak secara kecil-kecilan. Marx dan Engels (1947/1932) berpendapat bahwa superioritas perekonomian maskulin merupakan hukum alam dan potensi perbudakan terhadap jenis kelamin tertentu dalam keluarga adalah konsekuensi yang wajar. Engels mengatakan bahwa pola pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin itu cenderung konstan dari waktu ke waktu.

Pembagian kerja ada kalanya memang tidak seimbang, namun keseimbangan itu bukan berarti harus sama dalam satu atau jenis pekerjaan. Hal ini dikembalikan pada kemampuan seseorang dalam bidang-bidang tertentu. Menurut T.O. Ihrom (dalam Amir, 2013: 2) menyatakan bahwa:

“Hasil studi *convention watch program* studi wanita Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kasus-kasus yang terungkap di berbagai perusahaan dan industri, yaitu:

Dalam mendapatkan hak perempuan atas kesempatan kerja yang sama dengan pria, kebebasan memilih profesi pekerjaan, promosi, dan pelatihan.

- 1) Dalam hal mendapatkan upah yang sama terhadap pekerjaan yang sama nilainya.
- 2) Dalam menikmati hak terhadap jaminan sosial.
- 3) Hak terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.
- 4) Hak untuk tidak diberhentikan dari pekerjaan (dan tetap mendapatkan tunjangan) karena menikah dan melahirkan, hak akan cuti haid dan cuti hamil.”

Pembagian kerja seksual merupakan pembagian kerja yang didasarkan atas jenis kelamin. Di kalangan masyarakat terdapat pembagian kerja seksual di mana beberapa tugas dilaksanakan oleh perempuan dan beberapa tugas lain semata-mata dilakukan oleh laki-laki. Kesadaran akan perbedaan pendefinisian maskulinitas dan feminitas di setiap masyarakat ini membawa kesadaran akan adanya bentuk-bentuk pembagian kerja secara seksual yang berbeda.

Tetapi dalam perkembangannya, masyarakat kita tidak bisa menghindari telah terjadinya pergeseran peran dimana sebagian perempuan juga aktif di aktivitas kerja (publik) ataupun aktivitas sosial yang lain. Bahkan saat ini fenomena perempuan yang bekerja maupun berkarir menjadi bagian dari perkembangan kemajuan perempuan untuk mencapai posisi kesetaraan dan kemajuan relasi sosial yang setara antara perempuan dan laki-laki seperti yang terjadi di Wisata Agro Wonosari dalam pengelolaannya terdiri dari tiga bidang yang di koordinasi dua perempuan dan satu laki-laki (Saptari & Holzner, 1997).

2.2.2 Gender

Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender dapat diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan perilaku. Secara kodrat memang diakui adanya perbedaan (*distinction*), bukan pembedaan (*discrimination*) antara laki-laki dengan perempuan yaitu dalam aspek biologis. Perbedaan secara biologis yaitu senantiasa digunakan untuk menentukan dalam relasi gender, seperti pembagian status, hak-hak, peran dan fungsi dalam masyarakat (Warliah, 2017: 120). Gender melihat perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi karakteristik, sikap dan perilaku masing-masing dalam konteks sosial budaya, berbeda dengan seks hanya melihat perbedaan jenis kelamin (Putiyani, 2011: 18).

Dalam perkembangannya, gender digunakan sebagai pisau analisis yang memahami realitas sosial berkaitan dengan perempuan dan laki-laki. Isu gender di era global adalah masalah penindasan, eksploitasi, kekerasan dan persamaan hak dalam keluarga, masyarakat dan Negara. Masalah yang sering muncul ialah perdagangan perempuan dan lainnya yang umumnya timbul berbagai faktor yang saling terkait, antara lain dampak negatif dari proses urbanisasi, relatif tingginya angka kemiskinan, serta rendahnya tingkat pendidikan.

2.2.3 Kesetaraan Gender

Berdasarkan perspektif gender, perbedaan peran laki-laki dan perempuan berawal pada ideologi gender. Menurut Septiani (dalam

Putriyani, 2011: 23) ideology gender adalah segala aturan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui pembentukan identitas maskulin dan feminisme. Diyakini bahwa secara biologi perempuan dan laki-laki itu berbeda maka perannya juga harus berbeda. Ideology gender menyebabkan adanya pemilahan jenis pekerjaan, ada pekerjaan yang hanya cocok dengan perempuan dan ada juga jenis pekerjaan yang hanya cocok untuk laki-laki. Perbedaan ini tersosialisasikan sejak lahir. Jadi ketimpangan bukan terletak pada ketidakmampuan perempuan, tetapi lebih disebabkan ideology, sistem dan struktur yang bersumber dari ketidakadilan gender.

Kesetaraan atau keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan juga harmonis. Kondisi ini akan terwujud jika adanya perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Wujud kesetaraan gender adalah:

- 1) Akses, ialah kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki.
- 2) Partisipasi, perempuan dan laki-laki berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan.
- 3) Kontrol, perempuan dan laki-laki memiliki kekuasaan yang sama pada sumber daya pembangunan.
- 4) Manfaat, pembangunan harus memiliki manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana terjadi kesetaraan atau keadilan sosial antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan sosial ini

meliputi pelakuan yang sama dengan menentang subordinasi perempuan terhadap laki-laki di lingkungan rumah tangga mereka, menentang status yang rendah di tempat kerja, melawan pemerasan dalam keluarga, dalam masyarakat serta dalam agama dan menentang beban ganda yang mereka tanggung dalam produksi dan reproduksi (Putriyani, 2011: 25).

Pemaknaan kesetaraan gender dalam pengertian yang umum tersebut berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Dimana orang harus tahu bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak setara dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Keduanya memiliki hak yang setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan. Dengan demikian, kesetaraan gender merupakan penilaian yang sana yang diberikan masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki dan atas berbagai peran yang mereka jalani (Putriyani, 2011: 25).

Konsep kesetaraan gender ini merupakan suatu konsep yang sangat rumit dan memicu kontroversi. Hingga saat ini belum ada konsensus mengenai pengertian dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan bahwa kesetaraan yang dimaksud adalah persamaan hak dan kewajiban, yang tentunya masih belum jelas. Adapula yang mengartikan dengan konsep mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, yang juga masih abstrak artimya (Putriyani, 2020: 26).

2.2.4 Gender Bias

Kata bias dalam istilah bias gender berasal dari bahasa Inggris dengan arti “*often supporting or opposing a particular person or thing in a unfair way by allowing personal opinions to influence your judgment*” atau memihakkan terhadap suatu pihak secara tidak adil. Bias gender adalah pembagian posisi dan peran yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dengan sifat feminin dipandang selayaknya berperan di sektor domestik, sebaliknya laki-laki yang maskulin sudah sepatutnya berperan di sektor publik (Setyaningsih, 2015: 30).

Sektor domestik yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perempuan berada di bidang *food and beverage*, juru masak, tukang *laundry* dan restoran dalam pembagian kerja di Wisata Agro Wonosari, sedangkan laki-laki berperan di sektor publik yang dimaksud adalah laki-laki lebih banyak memegang koordinasi di setiap bidang yaitu *house keeping*, *front office*, pemelihara kolam renang dan kebun.

Bias gender adalah mengunggulkan salah satu jenis kelamin dalam kehidupan sosial atau kebijakan publik. Bias gender dalam wisata adalah realitas yang mengunggulkan salah satu jenis kelamin tertentu sehingga menyebabkan ketimpangan gender.

Menurut Mufidah (dalam Warliah, 2017: 123), dalam banyak kajian terbukti bahwa pembakuan peran dan pandangan yang bias gender bersumber dari budaya patriarki dan matriarki yang sangat berpotensi menimbulkan ketidakadilan baik pada perempuan maupun laki-laki.

Manifestasi dari ketidakadilan gender bersumber dari budaya tersebut, ialah:

1) *Stereotype*

Pelabelan terhadap jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang selalu berkonotasi negatif sehingga sering menimbulkan masalah, misalnya perempuan lemah, penakut, cerewet, emosional kurang bertanggung jawab dan sebagainya. Sedangkan laki-laki dipandang kuat, keras, kasar, rasional, egois, pelabelan seperti ini akan merugikan bagi keduanya, karena akan berimplikasi pembagian peran yang tidak seimbang dan timbul ketidakadilan.

2) Subordinasi

Sebuah pandangan yang tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin yang didasarkan pada *stereotype* gender, menyebabkan penempatan salah satu jenis kelamin pada status, peran dan relasi yang tidak setara dan adil.

3) Marginalisasi

Merupakan proses peminggiran baik sengaja maupun tidak disengaja terhadap jenis kelamin tertentu dari jenis kelamin lainnya secara sistematis dari mendapatkan akses dan manfaat dalam kehidupan akibat *stereotype* dan subordinasi. Dampaknya adalah perempuan sangat tertinggal dari laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat dari pendidikan, ekonomi dan politik.

4) Beban kerja yang tidak proporsional

Pemaksaan atau pengabaian salah satu jenis kelamin menanggung beban aktifitas berlebihan yang disebabkan pembakuan peran produktif untuk laki-laki dan perempuan yang kemudian berdampak pada pola pembagian kerja yang tidak fleksibel, pola kerja dikotomis atas dasar jenis kelamin demikian ini dapat memicu ketidakadilan gender.

5) Kekerasan berbasis gender

Pandangan bias gender yang menempatkan laki-laki adalah superior dan perempuan adalah inferior, berdampak pada hubungan hirarkis bukan setara, relasi yang timpang gender ini rentan terjadi kekerasan dimana pihak yang berkuasa melakukan kekerasan terhadap pihak yang dikuasai.

Sedangkan menurut Wiwik (dalam Bening & Maulana: 2016) ketimpangan gender dalam industri pariwisata, kaum perempuan masih memiliki peran yang terbatas dan belum bisa terlibat dalam hal-hal besar seperti pengambilan keputusan.

2.2.5 Nature dan Nurture

Secara etimologi *nature* diartikan sebagai karakteristik yang melekat atau keadaan bawaan pada seseorang atau sesuatu, diartikan juga sebagai kondisi alami atau sifat dasar manusia. Dalam kajian gender, kata *nature* diartikan sebagai teori atau argumen yang menyatakan bahwa perbedaan sifat antar gender tidak lepas dan bahkan ditentukan oleh

perbedaan biologis (seks). Disebut sebagai teori *nature* karena menyatakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan adalah natural dan dari perbedaan alami tersebut timbul perbedaan bawaan berupa atribut maskulin dan feminisme yang melekat padanya secara alami. Jadi seharusnya dalam menyikapi perbedaan yang bukan dengan menghilangkannya, melainkan dengan menghapus deskriminasi dan menciptakan hubungan serasi (khuza'I, 2013: 106).

Carol Gilligan mengatakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan harus dilihat sebagai keragaman (*diversity*) yang memang harus ada dalam alam ini yang tujuannya adalah saling melengkapi. Hanya saja adanya perbedaan atau keragaman ini selalu diidentikkan oleh kaum feminis sebagai adanya kelompok yang “lebih baik” (kualitas maskulin) atau yang “lebih buruk” (kualitas feminim) (Megawangi, 1999: 101).

Dalam kajian gender teori ini dipopulerkan oleh Carol Gilligan dan Alice Rossi yang akhirnya membelokkan feminisme ke arah *biological essentialism* pasca tahun 1980-an yang ditandai dengan penerimaan konsep perbedaan peran gender. Dibarengi dengan konsep ekofeminisme, argumen ini mampu membawa konsep *nature* menjadi lebih dominan. Para penggagas teori ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan sosial, kesetaraan yang adil dalam keragaman.

Secara etimologi *nurture* berarti kegiatan perawatan/pemeliharaan, pelatihan, serta akumulasi dari faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kebiasaan dan ciri-ciri yang nampak. Menurut konsep

nurture adanya diferensiasi peran (antara laki-laki dan perempuan bukan disebabkan oleh adanya perbedaan *nature* biologis, melainkan lebih disebabkan oleh faktor budaya. Budaya akan berorientasi dengan faktor biologis, dan menjadi terinstitusionalisasi. Institusi ini berfungsi sebagai wadah sosialisasi, dimana kebiasaan dan norma yang berlaku akan diwariskan secara turun menurun. Sesuatu yang *nature* tidak dapat diubah, sedangkan peran gender dapat diubah dengan teknologi. Dengan demikian, mereka yang berorientasi kultur percaya bahwa peran gender adalah konstruksi sosial budaya (Megawangi, 1999: 103).

Perbedaan konstruk sosial dalam masyarakat mengakibatkan relativitas tolak ukur atribut maskulin dan feminim antar budaya. Definisi baru tersebut juga menjurus pada dekonstruksi norma dan tatanan yang ada. Peraturan, kebiasaan, penilaian dan perlakuan yang didalamnya terdapat perbedaan dan pembedaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan muncul semacam ketimpangan gender, bias gender, hegemoni patriarki, *sexism* dan misogini. Jadi menurut penggagas teori ini yaitu Margaret Mead, Virginia Woolf Dkk, kesetaraan secara kuantitatif dan menyeluruh tanpa memandang jenis kelamin adalah satu-satunya solusi perbedaan yang terjadi (Khuza'I, 2013: 110).

2.2.6 Women in Development

Adanya kesadaran bahwa perempuan tertinggal dibandingkan laki-laki mendorong dikembangkan konsep emansipasi antara perempuan dan laki-laki. Kesadaran ini kemudian ditindaklanjuti dengan

berbagai konvensi, resolusi maupun penyusunan rencana aksi yang berupa perubahan untuk meningkatkan kondisi, situasi dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan. Seiring dengan perkembangan upaya memperbaiki tersebut, terjadi pula pergeseran strategi (yang meliputi *Women In Development*, *Women And Development*, *Gender And Development* dan kemudian dimatangkan oleh *gender mainstreaming*) (Arum, 2012: 16).

Women in development (WID-perempuan dalam pembangunan) menjadi bagian diskursus pembangunan, dan merupakan pendekatan dominan bagi pemecahan persoalan perempuan pada dunia ketiga. Gagasan *women in development* dianggap satu-satunya jalan guna memperbaiki status dan nasib berjuta-juta perempuan di Negara dunia ketiga.

Agenda utama program *women in development* adalah bagaimana melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan pembangunan. Asumsinya, penyebab keterbelakangan perempuan adalah karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Namun setelah kurang lebih sepuluh tahun berjalan banyak orang mulai menyangsikannya dan mengajukan kritik yaitu *women and development* (Fakih, 2001: 58).

2.2.7 Women and Development

Woment and development muncul sebagai kritik terhadap WID dengan konsep kritis bahwa pengintegrasian perempuan dalam pembangunan pada praktiknya adalah marginalisasi dengan pemahaman

adanya kesenjangan struktural. Konsep *women and development* memberikan makna bahwa kualitas kesetaraan lebih penting dari sekedar kuantitas. Pada tahun 1990 pendekatan *women and development/WAD* diubah menjadi *gender and development/GAD* yang menekankan prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan atau sebaliknya. *Gender and development* menfokuskan gerakannya pada hubungan gender dan kehidupan sosial. Gerakan ini beranggapan bahwa persoalan mendasar dalam pembangunan adalah adanya hubungan gender yang tidak adil dan situasi yang menghalangi pemerataan pembangunan dan partisipasi penuh perempuan. Kemudian pada konferensi Beijing pada tahun 1995 GAD secara resmi dimatangkan dengan strategi *gender mainstreaming* (Arum, 2012: 17).

2.2.8 Pengelolaan Wisata Agro

Wisata agro merupakan kegiatan yang berupaya mengembangkan sumberdaya alam suatu daerah yang memiliki potensi di bidang pertanian untuk dijadikan kawasan wisata (Oktaviani & Suryana, 2006).

Pengelolaan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya kerusakan, meliputi:

- 1) Perencanaan
- 2) Pemanfaatan
- 3) Pengendalian

- 4) Pemeliharaan
- 5) Pengawasan
- 6) Penegak hukum

Menurut Wood (dalam Pitana, 2002), terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan untuk mengembangkan wisata agro, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menekan serendah-rendahnya dampak negatif terhadap alam dan kebudayaan yang dapat merusak daerah tujuan wisata.
- 2) Memberikan pembelajaran kepada wisatawan mengenai pentingnya suatu pelestarian.
- 3) Menekan pentingnya bisnis yang bertanggungjawab yang bekerjasama dengan unsur pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan penduduk lokal dan memberikan manfaat pada usaha pelestarian.
- 4) Mengarahkan keuntungan ekonomi secara langsung untuk tujuan pelestarian, manajemen sumberdaya alam dan kawasan yang dilindungi.
- 5) Memberikan penekanan pada zona pariwisata regional dan penataan serta pengelolaan tanaman-tanaman untuk tujuan wisata di kawasan-kawasan yang ditetapkan untuk tujuan wisata tersebut.
- 6) Memberikan penekanan pada kegunaan studi berbasis lingkungan dan sosial, program jangka panjang untuk mengevaluasi dan menghindari dampak pariwisata terhadap lingkungan.

- 7) Mendorong usaha peningkatan ekonomi untuk Negara, pebisnis dan masyarakat lokal, terutama penduduk yang tinggal di wilayah kawasan yang dilindungi.
- 8) Berusaha meyakini bahwa perkembangan tidak melampaui batas soial dan lingkungan yang diterima seperti yang ditetapkan para peneliti yang telah bekerjasama dengan penduduk lokal.
- 9) Mempercayakan pemanfaatan sumber energi, melindungi tumbuhan, binatang liar dan menyesuaikan dengan lingkungan alam dan budaya.

Manfaat wisata agro apabila dikelola secara profesional (Sastrayuda, 2010), antara lain:

- 1) Meningkatkan konservasi lingkungan, pengembangan dan pengelolaan wisata agro yang objeknya benar-benar menyatu dengan lingkungan alamnya harus memperhatikan kelestarian lingkungan, jangan sampai pengembangannya merugikan lingkungan. Nilai-nilai yang ditekankan pada keseimbangan ekosistem dan kemampuan daya dukung lingkungan dapat memberikan dorongan bagi setiap orang untuk senantiasa memperhitungkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable developepment*), daerah agro wisata diharapkan dapat berguna bagi lingkungan.

Berdasarkan kawasan agro yang memiliki area yang luas serta ditanami berbagai jenis pohon, tanaman hortikultura akan mempengaruhi cuaca bahkan iklim disekitarnya.

- 2) Meningkatkan nilai estetika dan keindahan alam, panorama yang nyaman dan tertata rapi akan memberikan nuansa alami yang membuat seseorang akan terpesona apabila melihatnya. Pembangunan wisata agro didesain memiliki nilai keserasian sendiri dan manfaat terhadap komponen yang dapat menyatu dengan alam, oleh karena itu dalam pengembangan wisata agro dibutuhkan perencanaan tata letak, arsitektur dan lanskap yang tepat.
- 3) Memberikan nilai rekreasi, pengelolaan wisata agro dapat mengembangkan fasilitas lainnya yang dapat menunjang kebutuhan para wisatawan seperti restoran, menjual hasil pertanian dan lain-lain sehingga keberadaan wisata agro akan senantiasa berorientasi kepada pelayanan terbaik bagi pengunjung.
- 4) Meningkatkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan, sarana wisata agro tidak hanya bersifat memenuhi kebutuhan pengunjung akan tetapi sebagai sarana pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengelolaan wisata agro perlu menyediakan fasilitas penelitian seperti kebun percobaan, laboratorium alam dan lain-lain
- 5) Pengembangan ekonomi masyarakat, memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

2.3 Landasan Teori

Teori Nature oleh Edward Wilson

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori gender Edward Wilson dari Harvard University. Pada tahun 1990, Wilson dan rekan penulisnya Bert Holldobler menerbitkan buku mereka yang terkenal dengan judul “The Ants”. Kemudian karya selanjutnya yang menjadikan Edward Wilson sebagai pusat kontroversi sehingga dijuluki ‘bapak sosiobiologi’ yang mempelajari akar biologi dan evolusi perilaku sosial. Buku yang berjudul “*sociobiology*” terbit pada tahun 1975. Dalam karya tersebut terdapat teori yang menyatakan bahwa semua pengaturan peran jenis kelamin tercermin dari ‘biogram’ dasar yang diwarisi manusia modern dari nenek moyang primat dan hominid mereka. Intensitas keunggulan laki-laki tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis tetapi juga oleh elaborasi kebudayaan atas biogram manusia. Teori ini agak menggabungkan teori nature dan nurture sebagai pembentuk perilaku manusia, akan tetapi teori sosiobiologis sering ditunjuk sebagai alat melanggengkan sistem patriarki, perbedaan karena faktor biologis dianggap sebagai hasil refleksi budaya oleh feminis (supartiningsih, 2003: 49).

Edward Wilson pengertian kesetaraan gender menjadi tiga teori, yaitu (1) teori nurture (memelihara), (2) teori nature (alami), (3) teori equilibrium (keseimbangan). Menurut Edward Wilson kesenjangan gender disebabkan oleh faktor nurture dan nature. Faktor nurture adalah perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Faktor nature adalah perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Menurut Edward Wilson laki-laki dan

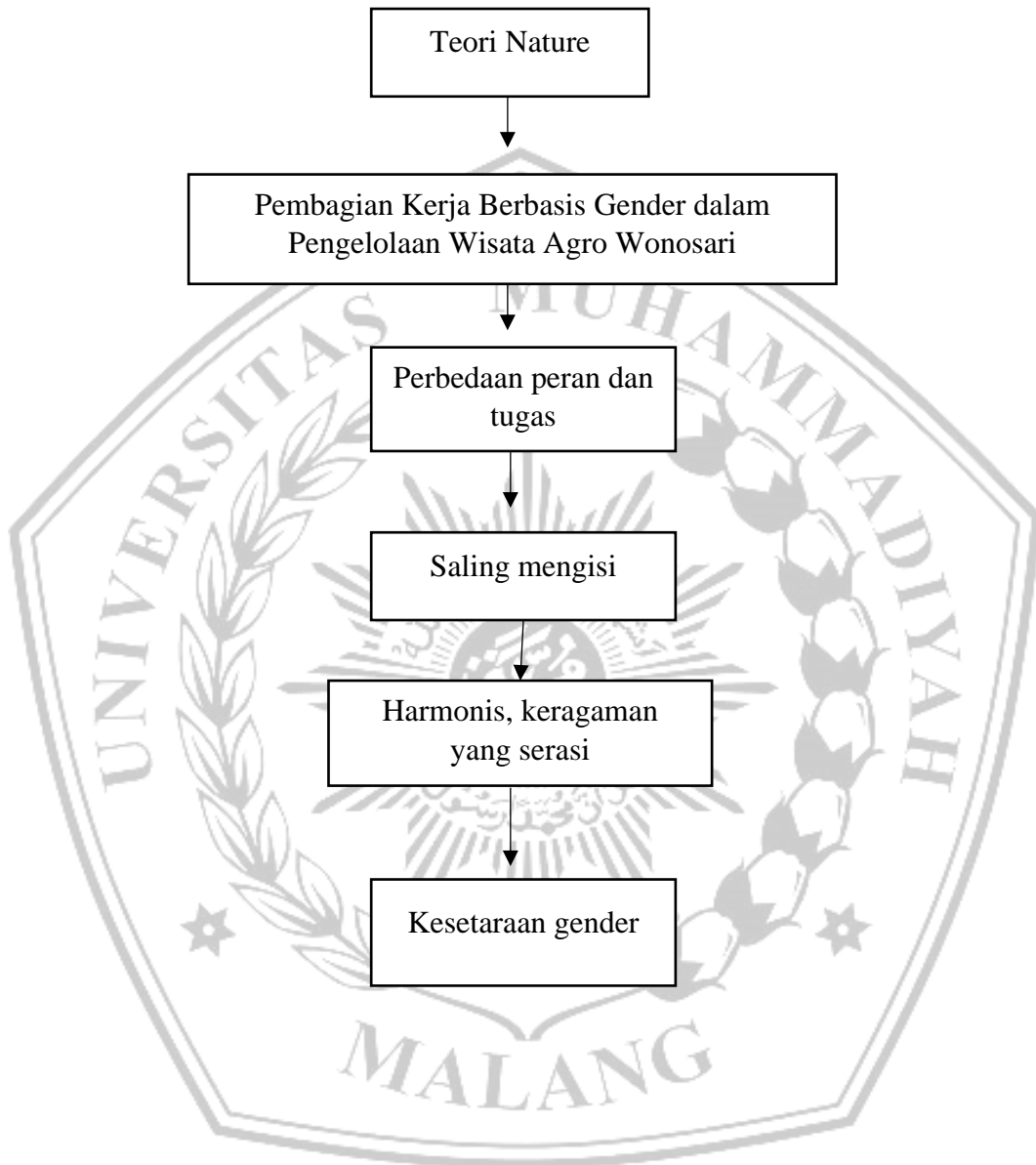
perempuan juga dapat bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan yang dikenal dengan teori equilibrium (Keseimbangan). Teori equilibrium ini menekankan pada keseimbangan dengan konsep kemitraan dan keharmonisan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan karena kedua belah pihak harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori nature sebagai alat menganalisis lapangan.

Secara etimologi nature diartikan sebagai karakteristik yang melekat atau keadaan bawaan pada seseorang atau pada sesuatu, diartikan juga sebagai kondisi alami atau sifat dasar manusia. Dalam kajian gender, *term* nature dikatakan sebagai teori atau argument yang menyatakan bahwa perbedaan sifat antar gender tidak lepas dan bahkan ditentukan oleh perbedaan biologis (seks). Disebut sebagai teori nature karena menyatakan bahwa perbedaan lelaki dan wanita adalah natural dan dari perbedaan alami tersebut timbul perbedaan bawaan berupa atribut maskulin dan feminisme yang melekat pada seseorang secara alami. Jadi seharusnya dalam menyikapi perbedaan yang ada bukan dengan menghilangkannya, melainkan dengan menghapus diskriminasi dan menciptakan hubungan serasi.

Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara dua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Manusia, baik perempuan ataupun laki-laki memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran, yang dilakukan secara demokratis dan

dilandasi oleh kesepakatan antara suami-isteri dalam keluarga atau antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat (Ismawati, 2017: 30).

Bagan 2.1 Kerangka berfikir



2.4 Kerangka Kerja Harvard (*Harvard Framework*)

2.4.1 Pengertian

Teknik ini sering disebut sebagai *gender framework analysis* atau (GFA), yaitu suatu analisis yang digunakan untuk melihat profil gender dari suatu kelompok sosial dan peran gender dalam proyek pembangunan, yang mengutamakan pentingnya tiga komponen dan interelasi satu sama lain, yaitu: profil aktivitas, profil akses dan kontrol (Putriyani, 2011: 34).

Dalam profil aktivitas perlu dilihat interaksi antara perempuan dan proyek-proyek pembangunan yang terjadi bertujuan untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh perempuan. Beberapa kategori kegiatan yang perlu diperhatikan ialah: produksi barang dan jasa, serta reproduksi dan perawatan sumber daya manusia. Profil akses dan kontrol didekati dengan mengidentifikasi kegiatan yang cenderung berspesifik gender dalam produksi, reproduksi dan perawatan. Arus sumber daya dan keuntungan (manfaat) ialah konsep dasar yang perlu dikaji untuk memahami bagaimana proyek dapat mengakses dan di akses oleh perempuan dan sejauh mana hal tersebut memberikan manfaat.

Sementara itu faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas, akses dan kontrol perempuan atas proyek pembangunan tersebut ialah: kondisi ekonomi secara umum (misalnya kemiskinan, distribusi pendapatan, inflasi), struktur kelembagaan (teknologi, skill dan birokrasi), sosio kultural, demografi, norma-norma masyarakat dan keagamaan, pendidikan, pelatihan dan faktor politik (Putriyani, 2011: 34).

2.4.2 Kegunaan

Teknik analisis Harvard ini dimodel sebagai landasan untuk melihat suatu profil gender dari suatu kelompok sosil. Kerangka in sangat mudah untuk diadaptasikan (luwes) dan tersusun atas tiga komponen pokok ialah:

1. Profil aktivitas dilihat berdasarkan pada pembagian kerja gender (siapa mengerjakan apa, di dalam rumah tangga dan lingkup masyarakat), yang memuat daftar tugas perempuan dan laki-laki (laki-laki melakukan apa, perempuan melakukan apa, sehingga memungkinkan dijadikan pengelompokkan menurut usia, kelas sosial tertentu, etnis, dimana dan kapan tugas tersebut dilakukan). Aktivitas nantinya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu produktif, reproduktif/ rumah tangga dan sosial politik keagamaan.
2. Proses akses (siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya produktif termasuk sumber daya alam seperti tanah, hutan, peralatan, pekerjaan, capital/kredit, pendidikan atau pelatihan) yang akan memuat daftar pertanyaan perempuan mempunyai atau dapat memperoleh sumber daya apa? Lelaki memperoleh apa ? Perempuan menikmati apa ? Laki-laki menikmati apa ?
3. Profil kontrol (perempuan dapat mengambil keputusan dan mengontrol pegunaann sumber daya apa ? Lelaki penentu sumber daya apa ?) sumber daya di sini berupa sumber daya yag diperlukan untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Manfaat apa yang diperoleh dari melakukan aktivitas. Sumber daya dapat berupa: materi (bernilai, ekonomis, sosial, politis dan waktu) akses terhadap sumber daya dan

manfaat, kontrol atas sumber daya dan manfaat kemudian dikelompokkan menurut gender, faktor-faktor yang berpengaruh terkait hal-hal yang menakibatkan pada adanya pembagian kerja, adanya profil akses dan control suatu masyarakat tersebut.

Terdapat elemen-elemen khusus dari kerangka ini yang cukup bermanfaat:

- a. Adanya perbedaan akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat dalam kaitannya dengan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
- b. Perbedaan antara akses terhadap sumber daya dan manfaat dengan kontrol atas sumber daya dan manfaat.
- c. Adanya pandangan yang lebih luas mengenai apa yang dimaksud dengan sumber daya yaitu tidak hanya sumber daya yang bersifat material tetapi juga ulit untuk diperhitungkan atau dinilai secara ekonomi seperti keterampilan dan organisasi sosial dan yang paling utama untuk para perempuan yaitu sumber daya dan manfaat yang berupa waktu (Putriyani, 2011: 35).